

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah (Soemiyati, 2000: 8). Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah: “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam” (Zahri Hamid, 1976: 1). Jadi,

perkawinan adalah ikatan lahir batin atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengaturan Perkawinan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka segala sesuatu yang memuat tentang perkawinan dalam garis besar secara pokok adalah bersumber pada Undang-Undang ini. Ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan berfungsi sebagai sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan. Dengan sendirinya Undang-Undang ini mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu dan itu didasarkan kepada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu (Rachmadi Usman, 2006: 245-246). Bagi warga negara yang beragama Islam, segala hal yang menyangkut tentang urusan perkawinan bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja melainkan mengacu juga pada peraturan pada Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam penegasannya juga dilanjutkan dengan penjabaran atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjabaran tersebut dimaksudkan adalah untuk membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedalam ruang lingkup syari'at Islam. Ketentuan pokok dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat umum dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang diberlakukan khusus untuk warga negara yang beragama Islam (M. Yahya Harahap, 2009: 38).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dipertegas dan diperluas kembali ke arah nilai-nilai Islami yakni bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ini kemudian dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yakni perkawinan adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (M. Yahya Harahap, 2009: 37-39). Jadi, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan-ketentuan pokok, diatur pula perkawinan menurut hukum Islam yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan-ketentuan khususnya dengan tetap mengacu pada ketentuan pokok. Kompilasi Hukum Islam dalam pengaturan tentang perkawinan berfungsi untuk menjabarkan dan memperluas apa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan lebih mengarah pada nilai-nilai Islami.

3. Syarat- Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 hingga Pasal 11, yakni merupakan syarat sahnya perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai, artinya tidak ada paksaan dalam perkawinan
- b. Calon mempelai yang belum berumur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

- d. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari wali
- e. Perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun
- f. Apabila perkawinan dilangsungkan sebelum usia calon memenuhi syarat, maka harus dimintakan dispensasi dari Pengadilan
- g. Perkawinan tidak diperbolehkan dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai hubungan darah, berhubungan susuan, berhubungan semenda
- h. Bagi calon mempelai wanita tidak berada dalam masa tunggu atau *iddah*
- i. Seseorang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali Pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari seorang

Sementara, syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan dalam Pasal 14 hingga Pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan perkawinan, harus ada calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul
- b. Perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan

- c. Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua
- d. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai
- e. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan maupun lisan/ isyarat selama tidak ada penolakan

Dalam Hukum Islam, akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Yang termasuk dalam syarat akad nikah adalah :

- a. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah
- b. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan
- c. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.

Yang dimaksud dengan rukun akad, ialah segala macam hal yang wajib ada dalam pelaksanaan akad. Termasuk di dalamnya :

- a. Shighat akad
- b. Maskawin
- c. Dua orang saksi
- d. Wali pihak calon mempelai perempuan
- e. Perwakilan (Kamal Mukhtar, 1993 : 37).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara lain adalah meliputi syarat materiil yakni dalam Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan Pasal 6 hingga Pasal 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 hingga Pasal 18.

Syarat materiil berkenaan dengan syarat yang melekat pada diri mempelai, adalah mengenai persyaratan orangnya; adanya persetujuan kedua mempelai, calon mempelai laki-laki harus sudah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun, tidak terkait pernikahan dengan orang lain kecuali bagi yang berpoligami, bagi wanita tidak sedang dalam masa *iddah*, tidak terkena larangan/halangan melakukan pernikahan, tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya, ada izin dari orang tua/ calon mempelai, izin pengadilan bagi yang hendak berpoligami.

Akad atau perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan dengan syarat akad nikah dan rukun akad. Syarat nikah meliputi kesanggupan dari calon mempelai, calon mempelai bukanlah orang yang terlarang melaksanakan perkawinan, dan calon mempelai adalah orang yang sejdoh. Adapun untuk syarat-syarat formal adalah mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, antara lain mengenai tata cara pencatatan perkawinan dan prosedur pelaksanaan perkawinannya (Rachmadi Usman, 2006 : 272-273). Misalnya, mengenai pemberitahuan kehendak menikah yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai, persyaratan perkawinan yang telah diajukan oleh kedua calon mempelai harus diteliti terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,

Pegawai Pencatat Perkawinan, pada saat sebelum perkawinan berlangsung, harus menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di depan saksi.

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 4 huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain juga disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (M. Yahya Harahap, 2009: 40).

Sama halnya dengan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan, ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pencatatan perkawinan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975, tahapan tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan

Pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi mereka yang melangsungkan pernikahannya dengan aturan Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah, Talak, dan Rujuk (P2NTR) atau Pembantu Pegawai Pencatat nikah, Talak, dan Rujuk (P3NTR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencacatan nikah Pasal 5, orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau pejabat setingkatnya dan memberitahukannya kepada penghulu. Sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya selain menurut

ketentuan Islam, maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini menandakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi yakni Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal antara lain :

- 1) Nama, didalamnya termasuk nama kecil dan nama keluarga.
- 2) Umur
- 3) Agama/kepercayaan
- 4) Tempat kediaman calon mempelai,
- 5) Apabila salah satu atau kedua calon mempelai pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya yang terdahulu

Pemberitahuan kehendak ini dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali disebabkan oleh sesuatu hal yang penting.

b. Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan

Penelitian syarat-syarat perkawinan tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975, dalam pencatatan perkawinan, Pejabat Pencatat Perkawinan meneliti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai

- 3) Izin tertulis/izin Pengadilan apabila seorang mempelai belum berusia 21 tahun
- 4) Izin Pengadilan/ Pejabat dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri
- 5) Dispensasi pengadilan mengenai perkawinan di bawah umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki
- 6) Surat kematian istri atau suami, atau surat perceraian
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya merupakan anggota ABRI (TNI dan Polri)
- 8) Surat kuasa autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, apabila salah satu mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan yang penting sehingga harus diwakilkan oleh orang lain.

c. Pengumuman Kehendak Melangsungkan Perkawinan

Setelah semua syarat-syarat dan tata cara pemberitahuan kehendak perkawinan terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan maka Pegawai Pencatat Perkawinan menyelenggarakan pengumuman dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perihal mengenai

pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang memuat hal-hal antara lain :

- 1) Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin maka disebutkan nama suami atau istri terdahulu
- 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan

Dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, pengumuman kehendak menikah dilakukan oleh Penghulu di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai, pengumuman ini ditempelkan selama 10 hari.

d. Pencatatan Perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, kemudian menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya perkawinan dicatat secara resmi dalam akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan .

B. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 (c) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 15 Ayat (2) dijelaskan bahwa bagi calon mempelai yang belum berumur mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur dalam pembahasan hukum adat, yang mempengaruhi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda, yakni:

- a. Adanya pesan (*tanggeh*: Lampung, *weling*: Jawa) dari orang tua yang telah meninggal dunia, misalnya dikarenakan antara kedua orang tua kedua belah pihak pernah mengadakan perjanjian untuk *besanan* (Jawa) agar tali persaudaraan menjadi kuat.
- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi keguncangan dalam kekerabatan dan kewarisan atau kedudukan terhadap harta kekuasaan.
- c. Terjadi sengketa antara kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat yang bersangkutan

- d. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan.
- e. Kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya gadis yang masih di bawah umur tersebut hamil diluar nikah (Hilman Hadikusumo, 1990: 93).

Selain faktor-faktor seperti tersebut di atas, secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah antara lain :

- a. Pendidikan yang rendah. Karena kurang menyadari adanya bahaya apabila terjadi perkawinan di bawah umur, banyak remaja yang putus sekolah atau hanya tamat sekolah dasar, kemudian menikah karena tidak punya kegiatan.
- b. Peraturan budaya. Peraturan budaya bisa jadi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam peraturan budaya usia layak menikah seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi perempuan. Dengan begitu, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah tetapi harus menikah karena peraturan budaya
- c. Kecelakaan. Tidak sedikit perkawinan remaja di bawah umur terjadi karena adanya “kecelakaan” dari pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikah. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan alin kecuali menikah. Pernikahan semacam ini biasanya tidak akan bertahan lama karena landasannya tidak kuat.
- d. Keluarga Cerai (*broken home*). Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah dini karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.
- e. Daya tarik fisik. Faktor lain adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan biasanya tidak berusia panjang (EB. Surbakti, 2008: 316-317).

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada umumnya adalah masalah ekonomi keluarga, tidak adanya pengertian

mengenai akibat adanya perkawinan di bawah umur, adanya perkawinan terpaksa, faktor kebiasaan adat budaya, faktor keluarga dan faktor perijodohan. Dalam masyarakat adat, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur biasanya adalah karena adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal, terjadinya sengketa adat, dan bahkan adanya perkawinan yang dilakukan karena terpaksa.

3. Akibat Perkawinan di bawah Umur

Dilihat dari beberapa penyebab perkawinan di bawah umur, terlihat bahwa sebagian remaja melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan kecelakaan atau hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor adat dan budaya serta masih banyak lagi. Berikut beberapa akibat dari dilakukannya perkawinan di bawah umur karena faktor tersebut di atas:

- a. Perceraian umumnya terjadi diantara anak-anak yang memutuskan untuk menikah karena hamil terlebih dahulu.
- b. Perkawinan diantara pasangan yang pendidikannya rendah, gaji kecil, tidak mempunyai pekerjaan atau keterampilan tidak mungkin dapat mempertahankan perkawinannya dalam waktu lama.
- c. Tidak akan mempunyai waktu untuk mengembangkan diri (Sri Esti Wuryani D., 2008: 214).

Akibat yang banyak terjadi dari perkawinan di bawah umur ini cenderung mengarah kepada banyaknya perceraian dan kurangnya kemampuan pasangan muda dalam mengembangkan dirinya karena sudah terikat dalam tali perkawinan. Kesibukan membina rumah tangga dan mengurus anak menjadi penghambat pasangan perkawinan di bawah umur untuk

berkembang dan mengekspresikan jiwa muda mereka karena sudah terbebani dengan tanggungjawab berkeluarga.

C. Tinjauan Tentang Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Pengertian dari dispensasi pada umumnya adalah merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996: 36). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 1 Ayat (2) sub g, yang dimaksud dengan dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan diperlukan bagi setiap calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun, calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun (Anwar Sitompul, 1984: 64). Dispensasi perkawinan ini kelonggaran, pengecualian dari ketentuan menurut Undang-Undang yang berupa penetapan dari Pengadilan Agama untuk laki-laki atau calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau perempuan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pasangan yang umurnya belum memenuhi syarat sah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Perkawinan maka wajib untuk meminta dispensasi dari Pengadilan Agama tempatnya tinggal atau berdomisili.

2. Persetujuan Izin dan Dispensasi

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pasal 12 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 ini juga dijelaskan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan (Anwar Sitompul, 1984: 65).

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang pencatatan Nikah Pasal 11 hingga Pasal 12 dijelaskan mengenai persetujuan, izin, dan dispensasi. Disebutkan bahwa pernikahan yang akan

dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai. Apabila seseorang calon mempelai belum berusia 21 tahun maka wajib mendapatkan izin dari orangtuanya. Untuk calon suami yang belum berusia 19 tahun dan calon istri yang belum berusia 16 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Persetujuan izin dan dispensasi diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

D. Tinjauan tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak (Sudikno Mertokusumo, 2002: 202). Putusan hakim dalam hal ini bukan hanya yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan tetapi juga pernyataan yang dituangkan secara tertulis. Putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan jika tidak diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentious* disebut putusan,

sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 202). Gugatan permohonan sering juga disebut gugatan *voluntair*. Ciri dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat untuk kepentingan sepihak, murni untuk menyelesaikan kepentingan hukum pemohon yang memerlukan kepastian hukum, permasalahan yang diajukan adalah tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (Yahya Harahap, 2008: 29). Dilihat dari cirinya, maka permohonan jelas berbeda dengan gugatan *contentious*. Gugatan *contentious* merupakan gugatan yang mengandung sengketa diantara para pihak yang berperkara yang penyelesaian perkaranya diajukan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian perkara dan bertindak sebagai penggugat sedangkan yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai tergugat (Yahya Harahap, 2008: 47).

Fundamentum petendi atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon (M. Yahya Harahap, 2008: 33). Isi dari petitum permohonan merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon, tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*, petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2008: 37). Proses

pemeriksaan gugat permohonan bersifat sederhana yakni hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti ataupun saksi yang diajukan oleh pemohon serta tidak terdapat tahap replik dan duplik seperti pada pemeriksaan gugat *contentious* (M. Yahya Harahap, 2008: 38). Prinsip pembuktian yang harus diterapkan dalam pemeriksaan gugat permohonan adalah pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang yakni dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Alat bukti yang sah meliputi tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ajaran Pembebanan berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata. Dalam hal ini, beban wajib bukti diserahkan pada pemohon. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal pembuktian yakni apabila alat bukti yang diajukan hanya sebagai alat bukti permulaan atau hanya satu saksi tanpa adanya alat bukti yang lain, maka alat bukti yang diajukan oleh pemohon belum mencapai batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan (M. Yahya Harahap, 2008: 40).

Demikian juga pada putusan hakim di peradilan agama. Dalam perkara permohonan produk keputusan yang dikeluarkan adalah penetapan, sedangkan untuk perkara yang mengandung sengketa produk keputusan yang dikeluarkan berbentuk putusan. Dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa putusan atas perkara permohonan disebut penetapan. Bentuk penetapan ini berkaitan dengan sifat atau corak gugat. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan (M. Yahya Harahap, 2009: 305).

Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat *volunteer*. Cirinya antara lain adalah merupakan gugat secara sepihak. Pihak hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak yang diposisikan sebagai tergugat. Keberadaan orang lain dalam permohonan yang bersifat *volunteer* hanya sebagai subjek. Gugat permohonan tidak bertujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Petitum dan amar gugat permohonan hanya bersifat *declaratoir*. Asas kebenaran pada putusan penetapan adalah asas kebenaran sepihak. Kebenaran ini hanya bernilai bagi pemohon saja. Kebenarannya tidak menjangkau orang lain. Kekuatan mengikat dari putusan ini juga hanya berlaku pada diri pemohon. Putusan penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena amarnya bersifat *declaratoir* (M. Yahya Harahap, 2009: 306).

Bentuk putusan Peradilan Agama yang lain adalah “putusan”. Dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk

putusan adalah keputusan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Gugat yang bersifat sengketa maupun mengandung sengketa disebut juga gugat *contentius*. Setiap gugat yang bersifat *contentius* melahirkan putusan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan eksekutorial (M. Yahya Harahap, 2009: 307).

Dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 57 Ayat (2) tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat “*Bismillahhirrahmanirrahim*” diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Untuk para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, syarat atau ciri batiniah menegakkan hukum, kebenaran dan keadilannya dilekatkan ciri yang lebih khusus. Jika dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 bahwa ikatan batiniah hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan digantungkan secara umum kepada “Tuhan Yang Maha Esa”, di dalam lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan selengkapny adalah

basmalah baru disusul simbol batiniah yang umum yakni”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (M. Yahya Harahap, 2009: 313).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang dinyatakan pada sidang terbuka umum yang berupa putusan dan penetapan. Putusan dari gugat *voluntair* atau permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, diktumnya berisi penegasan pernyataan hukum tentang hal yang diminta. Sedangkan putusan hakim untuk gugat *contentious* disebut putusan. Produk keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan merupakan putusan dari perkara permohonan. Dalam keputusan yang berbentuk penetapan, kebenaran hanya bersifat sepihak. Jadi hanya berlaku bagi diri pihak pemohon. Dalam amar putusan pun hanya bersifat deklaratoir, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi. Kekuatan mengikat penetapan juga hanya sebatas mengikat diri pihak pemohon, tidak mengikat terhadap orang lain yang tidak bersangkutan paut dengan permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Berbeda dengan bentuk putusan sebagai produk keputusan Pengadilan untuk perkara yang mengandung sengketa. Dalam putusan, amarnya bersifat condemnatoir atau menghukum. Hal ini berarti bahwa putusan mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan juga mengikat para pihak yang berperkara, tidak hanya satu pihak saja.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, terdapat bentuk-bentuk putusan, diantaranya adalah:

a. Dari aspek kehadiran para pihak

1) Putusan Gugatan Gugur

Putusan gugatan gugur terjadi jika penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut. Dalam hal ini, hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan maupun menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Akibatnya maka tergugat bebas dari perkara yang dimaksud, terhadap putusan gugur maka tidak dapat diajukan perlawanan dan penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru (M.Yahya Harahap, 2008: 873).

2) Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* merupakan kebalikan pengguguran gugatan. Hakim menjatuhkan putusan *verstek* apabila pada sidang pertama tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut (M.Yahya Harahap, 2008: 874).

3) Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini ditinjau dari kehadiran para pihak pada saat putusan dibacakan. Terdapat dua jenis putusan *contradictoir*,

pertama, pada saat putusan dibacakan para pihak hadir namun pada sidang-sidang sebelumnya salah satu pihak, tidak menghadiri persidangan, pada saat putusan dibacakan para pihak hadir dalam persidangan. Kedua, pada saat putusan dibacakan, salah satu pihak tidak hadir. Baik dari sidang pertama maupun sidang-sidang selanjutnya pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin pada salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain pihak yang bersangkutan selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan dibacakan salah satu pihak tidak hadir (M.Yahya Harahap, 2008: 874-875).

b. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

1) Putusan *Deklaratoir*

Putusan *declaratoir* berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak ataupun status. Dengan adanya pernyataan tersebut, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan (M.Yahya Harahap, 2008: 876).

2) Putusan *Constitutief*

Putusan ini merupakan putusan yang emmastikan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan yang

meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri yakni janda dan duda (M.Yahya Harahap, 2008: 876).

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Amar putusan *condemnatoir* di dalamnya tercantum amar yang berisi kalimat menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya (M.Yahya Harahap, 2008: 877).

c. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya

1) Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara. Dalam putusan sela, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir. Dalam teori dan praktik, muncul beberapa jenis putusan dari putusan sela yakni putusan *preparatoir*, adalah putusan yang tujuannya untuk mempersiapkan jalannya

pemeriksaan, putusan *interlocutoir* adalah putusan yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh hakim, serta putusan insidentil yang merupakan putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita agar sita dilaksanakan (M.Yahya Harahap, 2008: 879-884).

2) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara. Beberapa permasalahan mengenai putusan akhir antara lain adalah pertama putusan akhir secara formal menampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil. Kelalaian mencantumkan hal tersebut dalam putusan akhir secara formil putusan tersebut dianggap cacat. Kedua, menetapkan secara pasti hubungan hukum para pihak (M. Yahya Harahap, 2008: 887).

Dari penjelasan ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa bentuk dari putusan hakim bermacam-macam dan berbeda-beda pada tiap aspeknya. Untuk bentuk putusan hakim yang dilihat dari aspek kehadiran para pihak, terdapat putusan gugatan gugur yang terjadi jika penggugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan, putusan *verstek* yang merupakan kebalikan dari

putusan gugur, serta putusan *contradictoir*. Bentuk putusan ditinjau dari sifatnya terdiri atas putusan *deklaratoir* yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan hukum, putusan *constitutief* yang merupakan putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru, serta putusan *condemnatoir* dimana putusan ini amarnya menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ditinjau dari aspek saat penjatuhannya terdiri atas dua bentuk yakni putusan sela dimana hakim menjatuhkan putusan pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung dan putusan akhir yang merupakan tindakan hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa.

3. Susunan dan Isi Putusan Hakim

Dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan hakim dalam perkara perdata terdiri dari 4 bagian, yakni :

a. Kepala Putusan

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 bahwa setiap putusan hakim harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . Kepala putusan tersebut

memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan hakim, sehingga dapat dilaksanakan. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara (Sudikno Mertokusumo, 2002: 211). Ini berarti jika pihak yang dikalahkan tidak mau menaati keputusan secara sukarela, maka putusan dapat dijalankan dengan paksa (M. Yahya Harahap, 2009: 311).

b. Identitas para pihak yang berperkara

Di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak yakni nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada (Sudikno Mertokusumo, 2002: 213). Identitas para pihak, yakni penggugat dan tergugat dalam perkara sengketa, pemohon dan termohon dalam perkara permohonan, yang berperkara harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya serta nama kuasanya jika yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Pertimbangan/*considerans* (alasan-alasan)

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara

atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas antara pihak dan hakim, yakni para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan persoalan hukumnya adalah urusan hakim.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Sudikno Mertokusumo, 2002: 213). Dalam praktik, pada umumnya pertimbangan hakim diawali dengan kata-kata “MENIMBANG”. Pertimbangan hakim haruslah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, bantahan atau *eksepsi* dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada (Sarwono, 2011: 233). Disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu dalam perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili. Tentang duduk perkara dalam pertimbangan hakim, digambarkan secara singkat namun jelas kronologis duduk perkaranya. Sedangkan tentang pertimbangan hukumnya memuat tentang bagaimana hakim dalam mengkwalisir

fakta atau kejadian, menggambarkan tentang penilaian hakim mengenai fakta-fakta yang diajukan, mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item, serta memuat dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta yang diajukan dan memutus perkara baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis (Mukti Arto, 2011: 263). Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan (M.Yahya Harahap, 2008: 809-810). Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Sudikno Mertokusumo, 2002: 15).

d. Amar atau *Dictum* Putusan

Amar atau *dictum* putusan hakim merupakan jawaban atas petitum dalam gugatan penggugat. Artinya, amar atau *dictum* adalah tanggapan terhadap petitum. Amar atau *dictum* dibagi menjadi *dictum declaratif*, yakni penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa dan *dictum dispositif*, yakni yang memberi

hukum atau hukumannya, mengabulkan atau menolak gugatan. (Sudikno Mertokusumo, 2002: 217).

e. Biaya Perkara

Dalam praktik, biaya perkara adalah biaya yang dibebankan oleh pihak yang sedang berperkara dalam persidangan pengadilan yang dicantumkan dalam amar putusan, biaya-biaya yang berhubungan dengan proses persidangan (Sarwono, 2011: 234).

Dari beberapa uraian dan pendapat ahli di atas dapat kita lihat bahwa susunan dan isi putusan hakim terdiri atas beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut pertama merupakan kepala dari putusan yang memuat tentang peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk keputusan hakim Pengadilan Agama, dalam kepala putusan memuat kalimat Basmalah. Bagian kedua adalah identitas para pihak yang berperkara. Bagian ini terdiri atas nama, alamat, pekerjaan dan hal-hal umum atas diri para pihak. Selanjutnya bagian ketiga adalah bagian pertimbangan atau *considerans*. Pertimbangan merupakan dasar dari putusan hakim yang memuat alasan-alasan sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat dimana dalam putusan perdata terdiri atas dua pertimbangan yakni tentang duduk perkara dan tentang hukumnya. Amar atau *dictum* merupakan bagian dari isi putusan hakim yang keempat. Amar adalah jawaban dari petitum dalam gugatan penggugat. Bagian terakhir merupakan bagian yang memuat tentang besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang berperkara.

E. Tinjauan tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan pada dasarnya adalah lembaga ataupun badan yang melakukan peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan pengadilan agama dinyatakan pada Pasal 1 dan Pasal 2, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada pokoknya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum tertentu yang harus diputus berdasarkan syari'at Islam (Sudikno Mertokusumo, 2002 :137)

Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding.

2. Asas Umum Peradilan Agama

Asas-asas umum peradilan Agama terdapat dalam isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tersirat. Berikut asas-asas umum Peradilan Agama yang dimaksud:

a. Asas personalita Ke Islaman

Yang tunduk dan dapat ditundukkan oleh kekuasaan Peradilan Agama hanyalah mereka yang memeluk Agama Islam. dalam Ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 Ayat (1) diuraikan, ada beberapa penegasan mengenai asas tersebut:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
- 2) Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, dan;
- 3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasarkan hukum Islam (M. Yahya Harahap, 2009: 56).

Asas ini sekaligus sebagai dasar kewenangan absolut bagi Peradilan Agama. Sehingga pada prinsipnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang bertalian dengan masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah bagi mereka yang

memeluk agama Islam berdasarkan hukum Islam (Mukti Arto, 2011: 6)

b. Asas Kebebasan

Jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap terbatas dan relatif dengan acuan sebagai berikut :

1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintahan lainnya. Kebebasan dalam hal ini maksudnya adalah benar-benar mandiri murni berdiri sendiri.

2) Bebas dari paksaan, *direktiva*, atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*. Ini berarti hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman tidak dapat dipaksa mengambil keputusan yang dikehendaki oleh pihak yang memaksa. Segala paksaan yang datang dari manapun dan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.

3) Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan).

Kebebasan hakim mengacu pada menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, menafsirkan hukum yang tepat melalui penafsiran.

4) Kebebasan untuk mencari dan melakukan penemuan hukum (M. Yahya Harahap, 2009: 59).

c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan ini berarti mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6, penerapan kewajiban mendamaikan berupa tindakan antara lain:

- 1) Mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian
- 2) Dalam hal mereka mau berdamai ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak
- 3) Hakim tidak dapat memaksa para pihak untuk berdamai

Kewajiban mendamaikan ini berlangsung dan dapat diupayakan oleh hakim pada saat mulai awal persidangan, selama proses persidangan berlangsung, dan batasnya adalah sampai putusan dijatuhkan oleh hakim (M. Yahya Harahap, 2009: 65).

d. Asas Sederhana, Cepat, dan biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57 Ayat (3). Pada dasarnya asas ini diambil dari ketentuan

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tentang peradilan agama tidak dijelaskan bagaimana asas ini diterapkan. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan tetapi proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu lama dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (M. Yahya Harahap, 2009: 69).

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Makna pemeriksaan sidang terbuka untuk umum adalah berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan, siapapun yang berkunjung untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi ataupun dilarang. Pemeriksaan sidang terbuka untuk umum dapat menjadi bahan informasi bagi anggota masyarakat. Sekalipun asas terbuka untuk semua anggota masyarakat, akan tetapi dalam beberapa perkara persidangan di tutup untuk umum. Misalnya perkara perceraian. Sifat ketentuan sidang tertutup dalam pemeriksaan perceraian bersifat imperatif, karena aturan ini memiliki derajat yang bernilai ketertiban umum. Pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian hanya meliputi proses pemeriksaannya saja. Dalam proses pengucapan putusan kembali pada asas persidangan terbuka. Hal ini dijelaskan

dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (M. Yahya Harahap, 2009: 73).

f. Asas Legalitas dan Persamaan

Makna legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Pengadilan mengadili berdasarkan hukum. Hukum yang memegang supremasi dan dominasi. Ini berarti bahwa hakim yang berfungsi dan berwenang untuk menegakkan hukum melalui lembaga peradilan tidak diperkenankan bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segala-galanya. Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan hukum. Pihak yang sedang berperkara pun tidak diperbolehkan meminta putusan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Sedangkan pengertian asas kesamaan dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan dengan Pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan sidang di Pengadilan, perlindungan yang sama oleh hukum, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (M. Yahya Harahap, 2009: 83).

g. Asas Aktif memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan pada pencari keadilan lebih bersifat anjuran. Anjuran yang diberikan adalah dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Pemberian bantuan dan nasehat yang dibenarkan hukum sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal. Formal berarti berhubungan dengan tata cara berproses di pengadilan. Ini bertujuan agar proses pemeriksaan terarah, berjalan mulus, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan oleh hukum. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasehat (M. Yahya Harahap, 2009: 88-92).

Berlakunya asas-asas tersebut diatas diharapkan mampu memberikan kemudahan terhadap para pencari keadilan. Dalam pelaksanaannya, berbagai asas tersebut diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian bantuan dalam kewenangan hakim tidak berarti bersifat limitatif atau terbatas pada hal-hal diatas saja. Bantuan amsih bisa diperluas lagi dengan syarat asal dari permasalahannya masih dalam persoalan hukum formal.

3. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai daerah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri melihat bahwa pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Agama masih membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Oleh

karena itu, Pengadilan Agama terdapat pada setiap kota kabupaten. Tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain adalah :

- 1) izin beristri lebih dari seorang
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi perkawinan;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;

- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) penguasaan anak-anak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal usul seorang anak;

21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah

i. Ekonomi syari'ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1) bank syari'ah;

2) lembaga keuangan mikro syari'ah.

3) asuransi syari'ah

4) reksa dana syari'ah

5) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

6) sekuritas syari'ah

- 7) pembiayaan syari'ah
- 8) pegadaian syari'ah
- 9) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 10) bisnis syari'ah (Mukti Arto, 2011: 1-2).

Selain dalam Undang-Undang Peradilan Agama, wewenang Pengadilan Agama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam. Masalah-masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Anak Dalam Kandungan
 - 1) sah/ tidaknya kehamilan
 - 2) status anak sebagai ahli waris
 - 3) bagian warisan anak
 - 4) kewajiban orang tua terhadap anak
- b. Kelahiran
 - 1) Penentuan sah/ tidaknya anak
 - 2) Penentuan asal-usul anak
 - 3) Penentuan status anak/ pengakuan anak
- c. Pemeliharaan Anak
 - 1) Perwalian terhadap anak

- 2) Pencabutan kekuasaan orang tua
- 3) Penunjukan/ penggantian wali
- 4) Pemecatan wali
- 5) Kewajiban orang tua/ wali terhadap anak
- 6) Pengangkatan anak; anak sipil, anak terlantar
- 7) Sengketa hak pemeliharaan anak
- 8) Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat
- 9) Pembatalan pengangkatan anak
- 10) Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

d. Perkawinan (Akad Nikah)

- 1) Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya
- 2) Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
- 3) Ijin kawin dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun
- 4) Wali Adhol
- 5) Pencegahan perkawinan
- 6) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 7) Ijin beristri lebih dari seorang
- 8) Penetapan sahnyanya perkawinan
- 9) Pembatalan perkawinan

- 10) Penolakan ijin perkawinan campuran oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 11) Penetapan sah/ tidaknya rujuk
- e. Hak dan Kewajiban Sumai-Istri
- 1) Mahar
 - 2) Penghidupan istri (nafkah, kiswah, maskah, dan sebagainya)
 - 3) Gugatan atas kelalaian suami terhadap istri
 - 4) Penetapan nusyuz
 - 5) Perselisihan suami-istri
 - 6) Gugatan atas kelalaian istri
 - 7) Muth'ah
 - 8) Nafkah Iddah
 - 9) Sengketa tempat kediaman bersama suami-istri
- f. Harta Benda dalam Perkawinan
- 1) Penentuan status harta benda perkawinan
 - 2) Perjanjian harta benda dalam perkawinan
 - 3) Pembagian harta benda perkawinan
 - 4) Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan
 - 5) Sita marital harta perkawinan
 - 6) Sengketa wakaf
 - 7) Harta bawaan suami-istri
- g. Putusnya Perkawinan

- 1) Penentuan putusnya perkawinan karena kematian
 - 2) Perceraian atas kehendak suami (cerai talak)
 - 3) Perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat)
 - 4) Putusnya perkawinan karena sebab yang lain
- h. Pemeliharaan orang tua
- i. Kematian
- 1) Penetapan kematian secara yuridis
 - 2) Penetapan sah/ tidaknya wasiat
- j. Kewarisan
- 1) Penentuan ahli waris
 - 2) Penentuan harta peninggalan
 - 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - 4) Pembagian harta peninggalan
 - 5) Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
 - 6) Pengangkatan wali bagi ahli waris yang belum cakap bertindak
 - 7) Baitul Mal (Mukti Arto, 2011: 1-2)

Tugas-tugas lain dari Pengadilan Agama di luar perkara antara lain adalah pelayanan untuk Legalisasi Akta Keahliwarisan, pemberian pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, rokhaniwan sumpah, penyelenggaraan hisab dan rukyat hilal, penyuluhan hukum, memberikan fatwa pada instansi pemerintah, pelayanan riset, mengawasi penasehat hukum (Mukti Arto, 2011: 2-5).

Demikian tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Tugas dan wewenang tersebut tidak hanya terbatas pada hukum keluarga dan hukum perorangan saja, melainkan juga mencakup mengenai ekonomi syariah yang diatur secara pasti oleh Undang-Undang ini.

4. Proses Beracara di Pengadilan Agama

Membahas tentang bagaimana proses berperkara di pengadilan agama, tentunya merujuk pada peraturan tentang hukum acara Pengadilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum perdata materiil di muka Pengadilan Agama. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata umum yang berlaku pada lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

a. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas-asas dalam hukum acara peradilan agama antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan agama adalah peradilan negara
- 2) Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
- 3) Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- 4) Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam
- 5) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
- 6) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 7) Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang
- 8) Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar
- 9) Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim
- 10) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili
- 11) Beracara dikenakan biaya
- 12) Hakim bersifat menunggu
- 13) Hakim pasif
- 14) Hakim aktif dalam memimpin persidangan

- 15) Persidangan terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain
- 16) Hakim mendengar kedua belah pihak
- 17) Hakim berkuasa memberi perintah
- 18) Tidak harus lewat pengacara
- 19) Pihak tergugat/termohon wajib dianggap tidak bersalah
- 20) Para pihak berhak mendapat bantuan hukum
- 21) Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis
- 22) Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai
- 23) Hakim wajib mendamaikan para pihak
- 24) Hakim membantu para pihak
- 25) Pemeriksaan dilakukan secara manusiawi
- 26) Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya
- 27) Putusan harus disertai alasan
- 28) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia
- 29) Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat basmalah diikuti dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 30) Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

- 31) Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara dimuat dalam Berita Acara
- 32) Terhadap setiap putusan atau penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut Undang-Undang
- 33) Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga perikemanusiaan dan perikeadilan
- 34) Tuntas dan final (Mukti Arto, 2011: 8-12).

b. Isi Gugatan/ Permohonan

- 1) Identitas para pihak
- 2) Posita, penjelasan tentang keadaan dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar gugat.
- 3) Petitum (Mukti Arto, 2011: 40)

c. Proses Perkara

Dalam alur proses perkara terdapat sistematika yang harus dijalani pihak penggugat/pemohon. Berikut adalah sistematika proses perkara di Pengadilan Agama:

- 1) Meja I. Menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat SKUM.
- 2) Kasir. Menerima uang panjar dan membukukannya, menandatangani SKUM, dan memberi nomor pada SKUM.
- 3) Meja II. Mendaftar gugatan, memberi nomor perkara pada surat gugat sesuai SKUM, menyerahkan kepada penggugat satu

lembar surat gugat, mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil Panitera dan Panitera.

4) Ketua Pengadilan Agama. Mempelajari dan membuat Penetapan Majelis Hakim

5) Panitera. Menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas pada Majelis.

6) Majelis Hakim. Membuat penetapan hari sidang dan perintah memanggil para pihak, menyidangkan perkara, memberitahukan kepada meja II dan kasir berkaitan dengan tugas mereka, memutus perkara.

7) Meja III. Menerima berkas dari Majelis Hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir melalui jurusita, memberitahukan kepada Meja II dan Kasir, menetapkan kekuatan hukum

8) Menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat

9) Panitera Muda Hukum. Mendata perkara, melaporkan perkara, mengarsipkan berkas perkara (Mukti Arto, 2011: 58).

d. Tata Cara Memasukkan Gugatan

Surat gugatan/permohonan yang telah dibuat serta ditandatangani kemudian diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama. untuk surat gugatan diajukan kepada bagian Sub Kepaniteraan Gugatan, sedangkan untuk surat permohonan diajukan kepada Sub Kepaniteraan Permohonan. Penggugat/pemohon menghadap meja I

untuk menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Untuk yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat dengan dilegalisir oleh camat (Mukti Arto, 2011: 59). Untuk tata cara pengajuan gugatan atau permohonan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan

Permohonan atau gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan dengan permintaan agar Pengadilan menentukan hari persidangan, memanggil penggugat dan tergugat serta memeriksa perkara yang diajukan.

- 2) Gugatan disampaikan kepada Panitera Pengadilan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gugatan yang telah ditandatangani dimasukkan pada Panitera Pengadilan.

- 3) Pemohon wajib lebih dulu membayar ongkos perkara.